



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 9 Mei 2019
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
di-
AMBON

Nomor : 188.341/3629/SJ
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Nomor Register
7 (tujuh) Ranperda dan
Pengembalian atas 1 (satu)
Ranperda Provinsi Maluku

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 188.34/1376 tanggal 18 April 2019 perihal Permintaan Nomor Register, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ranperda tentang Penanggulangan Bencana telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/6685/Otda tanggal 4 September 2017 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penanggulangan Bencana dan diberikan Nomor Register sebagai berikut:
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (7-113/2019).
2. Bahwa Ranperda tentang Perpustakaan Umum Provinsi telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/6694/Otda tanggal 4 September 2017 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan diberikan Nomor Register sebagai berikut:
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (8-114/2019).
3. Bahwa Ranperda tentang Kelembagaan dan Pemerintahan Desa telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/4003/Otda tanggal 30 Mei 2017 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku dan diberikan Nomor Register sebagai berikut:
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (9-115/2019).
4. Bahwa Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/6539/Otda tanggal 30 Agustus 2017 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi dan diberikan Nomor Register sebagai berikut:
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (10-116/2019).
5. Bahwa Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/4004/Otda tanggal 30 Mei 2017 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku dan diberikan Nomor Register sebagai berikut:
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (11-117/2019).

6. Bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/9067/Otda tanggal 13 November 2018 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan diberikan Nomor Register sebagai berikut:

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (12-118/2019).

7. Bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/8589/Otda tanggal 29 Oktober 2018 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan diberikan Nomor Register sebagai berikut:

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (13-119/2019).

8. Terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal belum dapat diberikan Nomor Register karena masih perlu dilakukan koordinasi terkait hasil fasilitasi Ranperda yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
9. Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Gubernur Maluku di Ambon; dan
3. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.